

MENUJU INDONESIA MENJADI PUSAT EKONOMI SYARIAH TERKEMUKA DUNIA: SEBUAH PERJALANAN *DYNAMIC GOVERNANCE*

Abdillah Ubaidi Djawahir
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
abdillah@uniramalang.ac.id

Abstract: *Dynamic governance does not emerge spontaneously, but results from leadership efforts that have the capability to develop an advanced nation in order to be able to survive in a rapidly changing environment. This paper aims to describe the journey of dynamic governance capabilities in realizing the vision of an Independent, Prosperous and Madani Indonesia by Becoming the World's Leading Sharia Economic Center. This vision is a philosophical view and action plan for the Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024. Referring to this vision, the four main objectives are: (1) Increasing the scale of Islamic economic and financial business; (2) Increasing the ranking of the Global Islamic Economy Index; (3) Increased economic independence; and (4) Increasing the welfare index of the Indonesian people. To achieve this vision, four main strategies are used as references by stakeholders in the Islamic economy. These strategies are: (1) strengthening the halal value chain consisting of the food and beverage industry, tourism, Muslims, media, recreation, the pharmaceutical and cosmetics industry, and the renewable energy industry; (2) strengthening Islamic finance; (3) strengthening micro, small and medium enterprises (MSMEs); and (4) strengthening of the digital economy. As the four basic strategies that become the ecosystem supporting the main strategy, namely: (1) approval and governance support, (2) research and development capacity development; (3) Improving the quality and human resources; and (4) Awareness raising and public literacy.*

Keywords: *Sharia Economics Masterplan, Dynamic Governance, Global Islamic Economy Index, SDGs.*

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi acuan pembangunan pada tataran global. Ini terjadi karena SDGs menjadi kesepakatan bersama pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70. Tujuan pembangunan universal baru ini



dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2030. Konsep SDGs berkaitan dengan beberapa isu krusial yang berpengaruh secara global, seperti depresiasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs dibentuk dengan 17 tujuan yang hendak dicapai¹.

Ketujuhbelas tujuan tersebut sebagai berikut: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dengan 5 (Lima P) prinsip universal: *people, prosperity, peace, planet, partnership*. Kementerian PPN/ Bapenas menyebut universalitas ini adalah SDGs sebagai Kemajuan Suatu Bangsa dengan penjelasan: Kemajuan pada satu dimensi membutuhkan keterlibatan aktif dimensi lain; Katalis untuk kemitraan internasional; Kepemilikan bersama; SDGs sebagai kerangka komprehensif, terintegrasi dan tidak terpisahkan².

SDGs adalah titik referensi untuk memprioritaskan penerima manfaat pada sektor ekonomi Islam karena SDGs mencakup banyak keprihatinan terkait dengan *maqasid al-Shariah*, atau tujuan-tujuan syariah. *Maqasid al-Shariah* berupaya melindungi dan melestarikan manfaat dan kepentingan masyarakat dan perolehan kekayaan secara adil, transparan, dan akuntabel. *The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019* merilis bahwa SDGs untuk setiap sektor ekonomi Islam, dan menganggapnya sebagai pemacu pertumbuhan bagi ekonomi Islam global³.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah mengalami pertumbuhan dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. *The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019* melaporkan bahwa besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2,1 triliun pada tahun 2017 dan diproyeksikan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun pada 2023. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang pada

¹ Katalog BPS — Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2018* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), 2 .

² Materi Sosialisasi — Arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Arahan Terkait Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBS)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. (Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs Semarang: 15 Desember 2017), 6.

³ Artikel dalam Internet —,"What are the most urgent SDGs the Islamic economy must address?" dalam www.salaamgateway.com/29-October-2018/ diakses 1-Nopember-2019.



tahun 2017 mencapai 1.84 miliar orang ekuivalen 24 persen dari populasi dunia. Jumlah ini akan terus meningkat dan mencapai 27.5 persen pada 2030⁴. Dan Peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan.⁵

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa (*Global Islamic Economy Report 2018-2019*). Ini adalah ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Menurut laporan yang sama, Indonesia termasuk 10 besar konsumen pada setiap sub-sektor dalam industri halal. Rinciannya adalah sebagai berikut: (1) Peringkat pertama pada *top muslim food expenditure*; (2) Peringkat kelima pada kategori *top muslim travel expenditure*; (3) Peringkat ketiga pada *top muslim apparel expenditure*; (4) Peringkat kelima pada *top muslim media expenditure*; (5) Peringkat keenam pada *top muslim pharmaceuticals expenditure*. Namun, pada kelima industri tersebut, Indonesia menempati posisi 10 besar menurut pemeringkatan *Global Islamic Economy (GIE) Index*⁶.

Secara global, populasi penduduk Muslim Indonesia mayoritas namun GIE index dari tahun 2014/2015 sampai 2018/2019 stagnan pada ranking 10, dengan besaran indeks berturut-turut 34, 34, 26 dan 45. Hal ini respon dengan target pencapaian utama ke-2 pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dengan dengan visi Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia.

Dynamic governance di negara maju dan demokratis sudah merupakan bagian yang integral dari sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Sedangkan, di negara yang sedang berkembang, *dynamic governance* tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari upaya kepemimpinan yang memiliki kapabilitas untuk membangun suatu bangsa yang maju agar mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Kapabilitas adalah pola pikir dan cara kerja yang terbentuk dalam waktu yang lama melalui proses pembelajaran⁷.

EKONOMI ISLAM GLOBAL

Ekonomi Islam Global (*global Islamic economy*) didiskripsikan dan disajikan terkait pertumbuhan sektor ekonomi islam. Menunjukkan bagaimana permintaan laten

⁴ Book Report —, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19* (Thomson Reuters, 2018), 7.

⁵ Buku — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bapenas, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), xiv.

⁶ Ibid, 6.

⁷ Buku — Azhar Kasim, dkk, *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance* (Jakarta: Kompas Media, 2018), 16.



untuk pasar ini meluas ke seluruh dunia. Menampilkan ekosistem bisnis yang sudah berkembang, mulai yang melayani pasar dan juga menghadirkan kesenjangan besar dan peluang yang ada di pasar ini. Empat penggerak utama (*key driven*) berbasis pasar islam yang membentuk pertumbuhan dan keunggulan ekonomi Islam. Empat penggerak utama tersebut adalah: demografis; nilai-nilai berbasis Islam; pendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi; dan pertumbuhan perdagangan intra-OIC. Selain itu, empat penggerak berbasis lingkungan global yang mendorong ekonomi islam. Penggerak ini adalah: partisipasi perusahaan multinasional global; pasar global mencari peluang pertumbuhan; pendorong pertumbuhan konsumsi etis; dan peggerak revolusi teknologi komunikasi.⁸

Sektor ekonomi islam global menjadi perhatian ketika lembaga global (Thomson Reuters) merilis publikasi potensi belanja konsumen Muslim untuk berbagai produk konsumtif. Lembaga tersebut mencatat peningkatan daya beli Muslim di seluruh dunia, sehingga mempengaruhi perekonomian global. Terdapat enam industri halal yang sudah ada dalam lingkup global yang menjadi perhatian Thomson Reuters, yaitu sebagai berikut: keuangan, makanan, pariwisata, fesyen, media halal dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetika. Berdasarkan data yang rilis Thomson Reuter tahun 2018/ 2019, dari enam sektor yang tersebut, makanan halal merupakan pilar industri halal terbesar dilihat dari sisi *revenue*. Berikut ini adalah Spektum Nilai Muslim Global untuk konsumsi produk dan jasa industri halal.

⁸ Book Report —, *State of the Global Islamic Economy Report 2013* (Thomson Reuters, 2013), 19.



Gambar 1
Spektum Nilai Muslim Global untuk Konsumsi



Sumber: DinarStandar

LANSKAP EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Pemerintah Republik Indonesia dan semua stakeholder Komite Keuangan Syariah Nasional (KNKS) berupaya untuk mendukung pembangunan ekonomi syariah Indonesia, maka disusunlah dokumen Masterplan Ekonomi Syariah. Dokumen dan seluruh tahapan dalam penyusunannya merupakan ikhtiar untuk meningkatkan peran berbagai sektor ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah sektor riil, terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Secara lebih spesifik, yang dipilih adalah sektor produksi dan jasa. Terutama yang sudah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain. Kategori halal mempunyai cakupan yang sangat luas, karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari ekonomi syariah.

Dalam Undang-undang No.33/2014, produk halal berarti yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal).⁹

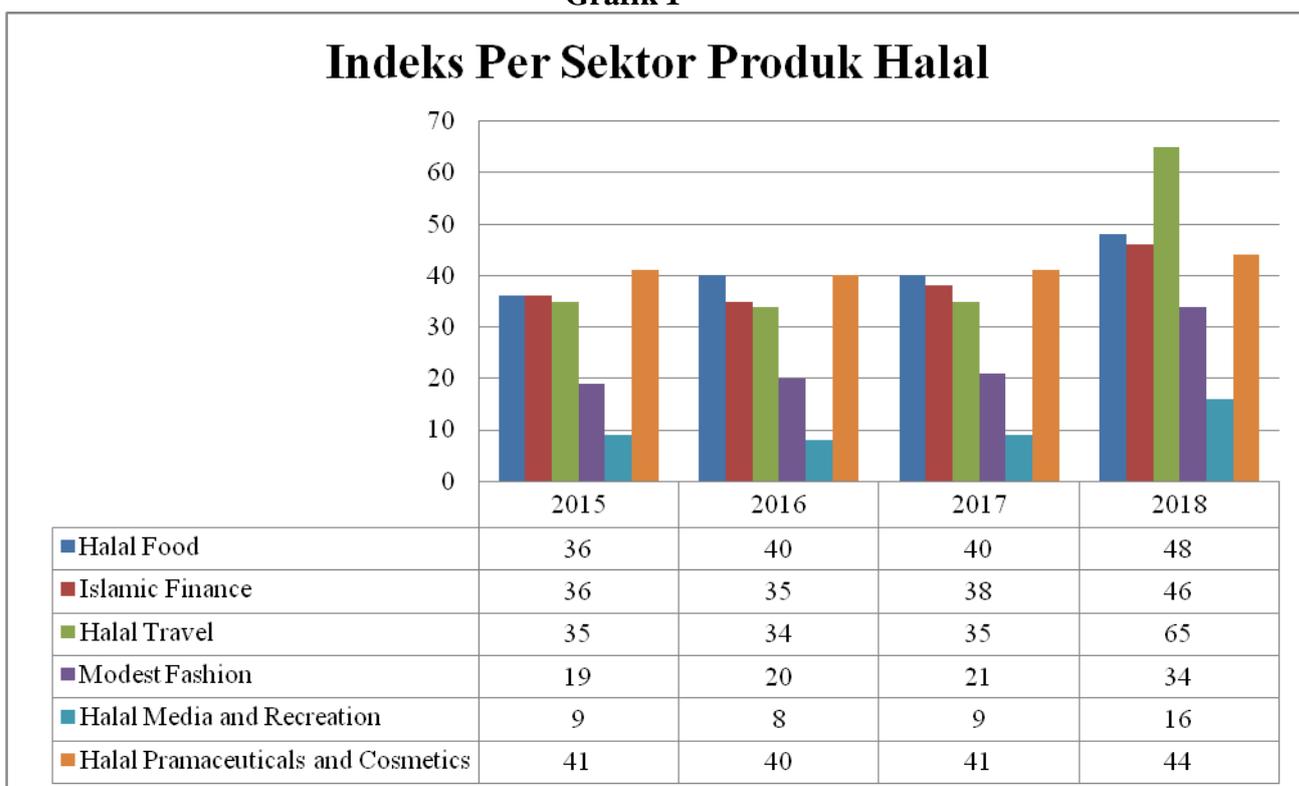
Berdasarkan *State of the Global Economy Report 2015-2018* per sektor, Indonesia pada tahun 2015-2017 secara konsisten sektor produk halal didominasi oleh *Halal Pharmaceuticals and Cosmetics* (Produk farmasi dan kosmetika halal), kemudian

⁹ Buku — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bapenas, Op.cit, 5.



halal food, Islamic finance (keuangan syariah), halal travel, fashion dan halal media. Ada perubahan dominasi sektor pada tahun 2018, dominasinya pada halal travel kemudian *halal food, Islamic finance (keuangan syariah), Halal Pramaceuticals and Cosmetics (Produk farmasi dan kosmetika halal), modest fashion dan halal media and recreation.* Artinya pada tahun 2018 industri halal yang selama 3 tahun mendominasi turun dan digantikan oleh halal food bahkan dominasinya juga dikalahkan oleh keuangan syariah.

Grafik 1



Sumber: State of the Global Economy Report 2015-2018

DYNAMIC GOVERNANCE

Pemerintahan dinamis (*dynamic governance*) berusaha mengubah haluan organisasi yang memungkinkan dapat terus berpacu di tengah jalan mulus. Menjadikan lingkungan sebagai kawan yang senantiasa dapat mendatangkan berbagai keuntungan¹⁰. *Dynamic governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah disusun agar mampu

¹⁰ Artikel dalam internet — Fahri Ardiansyah, "Praktik Inovasi Melalui Dynamic Governance" dalam www.kompasiana.com/4-Pebruari-2019/ diakses 1-Nopember-2019.



beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian dan perubahan sehingga dapat tetap relevan dan efektif untuk mencapai tujuan dan keinginan-keinginan jangka panjang.¹¹

Di negara maju dan demokratis, *dynamic governance* sudah menyatu dengan budaya dan mekanisme politik yang mampu menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik yang sesuai perubahan lingkungan. Sehingga kebijakan yang diambil merupakan dinamika perubahan yang terintegrasi dengan sistem sosial dan politik yang terjadi. Sebaliknya, di negara yang sedang berkembang, mekanisme politik yang demokratis pada umumnya elit penguasa belum efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Para elit penguasa dan politik lebih mementingkan kepentingan individu maupun golongan kelompoknya, tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Cenderung mempertahankan *status quo*. Walaupun, ada ikhtiar perubahan, dilakukan secara parsial, tidak menyeluruh dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Dynamic governance tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari niat dan ambisi kepemimpinan yang disengaja untuk struktur sosial dan interaksi ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang diinginkan¹².

KERANGKA BERPIKIR: *DYNAMIC GOVERNANCE*

Kerangka berpikir *Dynamic Governance* diperlihatkan pada gambar 2, dimana fondasi *Dynamic Governance* adalah budaya yang diinstitusionalisasikan dengan dua pengaruh utama (*able people* dan *agile processes*) untuk mengembangkan 3 (tiga) kemampuan *dynamic governance*¹³. Adalah *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* yang mengarah ke kebijakan adaptif (*adaptive policy*) ditunjukkan dibagian tengah. Faktor eksternal oleh *Future Uncertainties* dan *External Practices* ditunjukkan pada bentuk kotak pada sisi kiri gambar.

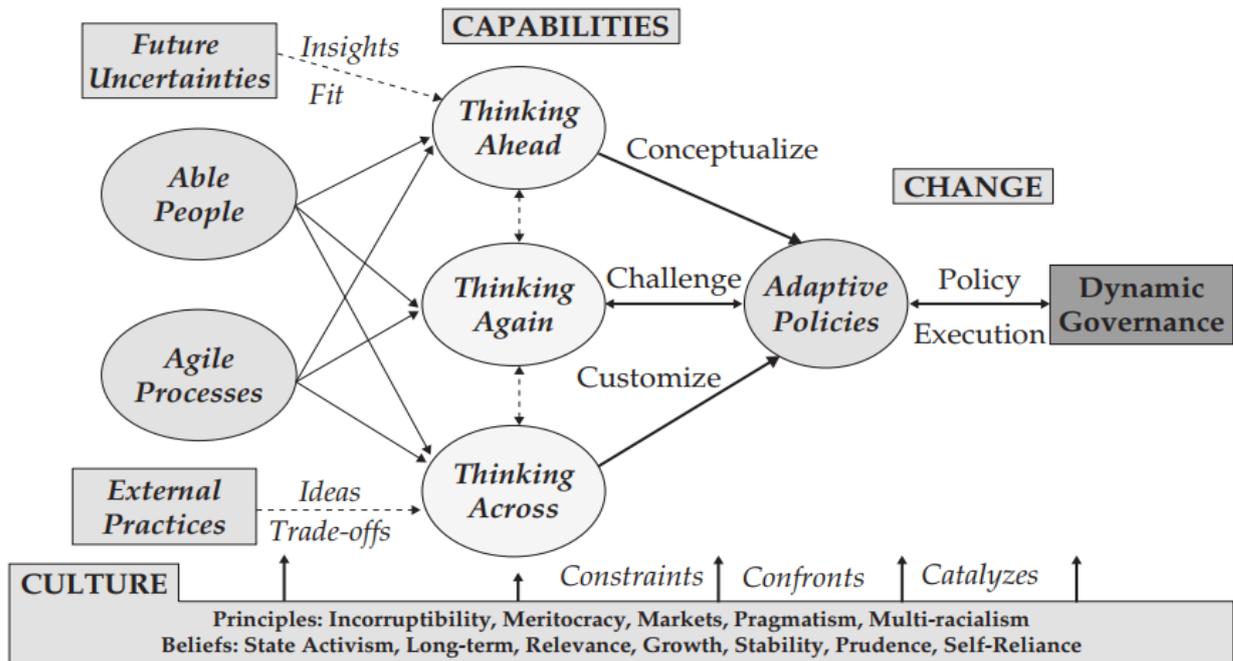
¹¹ Buku — Boon Siong Neodan Geraldine Chen, *DYNAMIC GOVERNANCE Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore* (Singapore: World Scientific Publishing, 2007), 2

¹² Ibid, 11

¹³ Ibid, 12



Gambar 2
Framework for Dynamic Governance System



Sumber : Boon & Chen, 2007

Thinking ahead - kemampuan menganalisis kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dari lingkungan eksternal dengan melihat peluang-peluang dan potensi ancaman yang ada. Kemampuan ini akan menjadikan sebuah institusi dapat memprediksikan perkembangan masa depan, akan berdampak pada pencapaian tujuan dari institusi pemerintah untuk mengatur negaranya.

Thinking again - kemampuan dalam melakukan evaluasi dan identifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil dan kualitas yang lebih baik. Sehingga intitusi dapat mengemukakan permasalahan dan isu yang dihadapi, dan melihat bagaimana cara untuk meningkatkan performa institusi. Kondisi ini membutuhkan efisiensi dan efektifitas kebijakan yang telah dibuat dan juga ketepatan dalam pencapaian tujuan dan penetapan strategi.

Thinking across - kemampuan melintasi batas-batas tradisional untuk “berpikir diluar batas”, juga untuk “belajar dari orang lain” apabila terdapat ide-ide bagus yang dapat diadopsi dan diadaptasikan sebagai inovasi baru dalam pembuatan kebijakan. Seperti meng-copy aturan dan kegiatan/ praktek yang telah berhasil diterapkan di suatu tempat. Mengizinkan transfer pengetahuan antar negara dengan mengadopsi program dari suatu negara dan diimplementasikan pada institusi lokal dan lingkungan kebijakan. Selain itu, harus mengerti bagaimana menerapkannya, bagaimana itu bekerja dengan



baik atau mengapa itu tidak bekerja dengan baik dan bagaimana penerapannya dengan sudut pandang yang berbeda dari ide dasarnya.

Adaptive policies bukanlah semata-mata reaksi pasif terhadap tekanan dari eksternal tetapi merupakan sebuah pendekatan proaktif terhadap inovasi, kontekstualisasi, dan eksekusi. Inovasi kebijakan berarti ide baru dan segar yang diinjeksikan ke dalam suatu kebijakan sehingga memperoleh hasil yang berbeda dan lebih baik. Ide-ide tersebut dikonversi menjadi sebuah kebijakan sehingga masyarakat akan menghargai dan mendukung kebijakan tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak hanya tentang ide dan desain kontekstual tetapi juga eksekusi kebijakan yang membuat perjalanan *dynamic governance* menjadi nyata.

VISI MENJADI PUSAT EKONOMI SYARIAH TERKEMUKA DUNIA SEBAGAI BENIH DYNAMIC GOVERNANCE

Dynamic governance merupakan sebuah pengalaman empirik dari kemajuan Singapura, dari pengalaman ini dibuat modeling menjadi konsep, teori dan pola pikir dalam ranah *public policy* (kebijakan public) untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Singapura begitu percaya diri dalam sharing konsep *dynamic governance* untuk menjadi *branchmarking* bagi negara-negara lain, namun tentunya konsep ini harus disesuaikan dengan karakter dan kultur masing-masing negara¹⁴. Penekanan pada kultural, seharusnya Indonesia tidak mengalami kesulitan dalam mengadaptasi konsep ini. Secara karakteristik, Indonesia dan Singapura memiliki persamaan sebagai negara Asia yang bersifat komunal yang menjunjung kekerabatan. Jika ditelisik lebih dalam, akan terlihat bahwa nilai-nilai meritokrasi dan visioner yang dimiliki Singapura juga dimiliki oleh Indonesia.

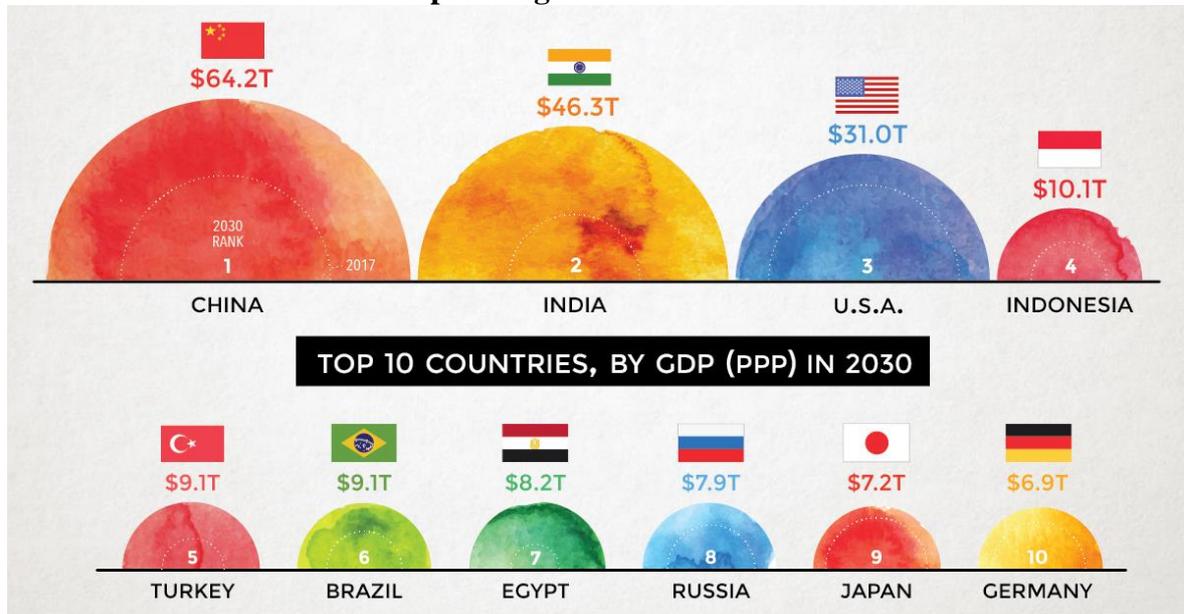
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang merupakan hasil kajian analisis ekonomi syariah mencanangkan Visi Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia. Visi Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia sebagai benih *dynamic governance* karena adanya nilai-nilai meritokrasi dan visioner seluruh elemen anak bangsa Indonesia. Visi ini merupakan pandangan filosofis dan rencana aksi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Merujuk visi tersebut, empat target capaian utama, yaitu: (1) peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah; (2) peningkatan peringkat *Global Islamic Economy Index*; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; dan (4) peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konteks perjalanan *dynamic governance*, masterplan ekonomi syariah sebagai *adaptive policies*. Kultur bangsa yang memiliki kepercayaan (*beliefs: state activism, Long-term, Relevance, Growth, Stability, Prudence* dan *Self-reliance*) dan harus optimis akan visi Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia, apalagi proyeksi dari Standard Chartered (Gambar 3) menempatkan

¹⁴ Kasim dkk, op.cit. 37



Indonesia sebagai 10 besar negara dengan Gross Domestic Product (GDP) urutan ke-4 setelah China, India dan Amerika Serikat pada tahun 2030¹⁵.

Gambar 3
Top 10 Negara Berdasarkan GDP



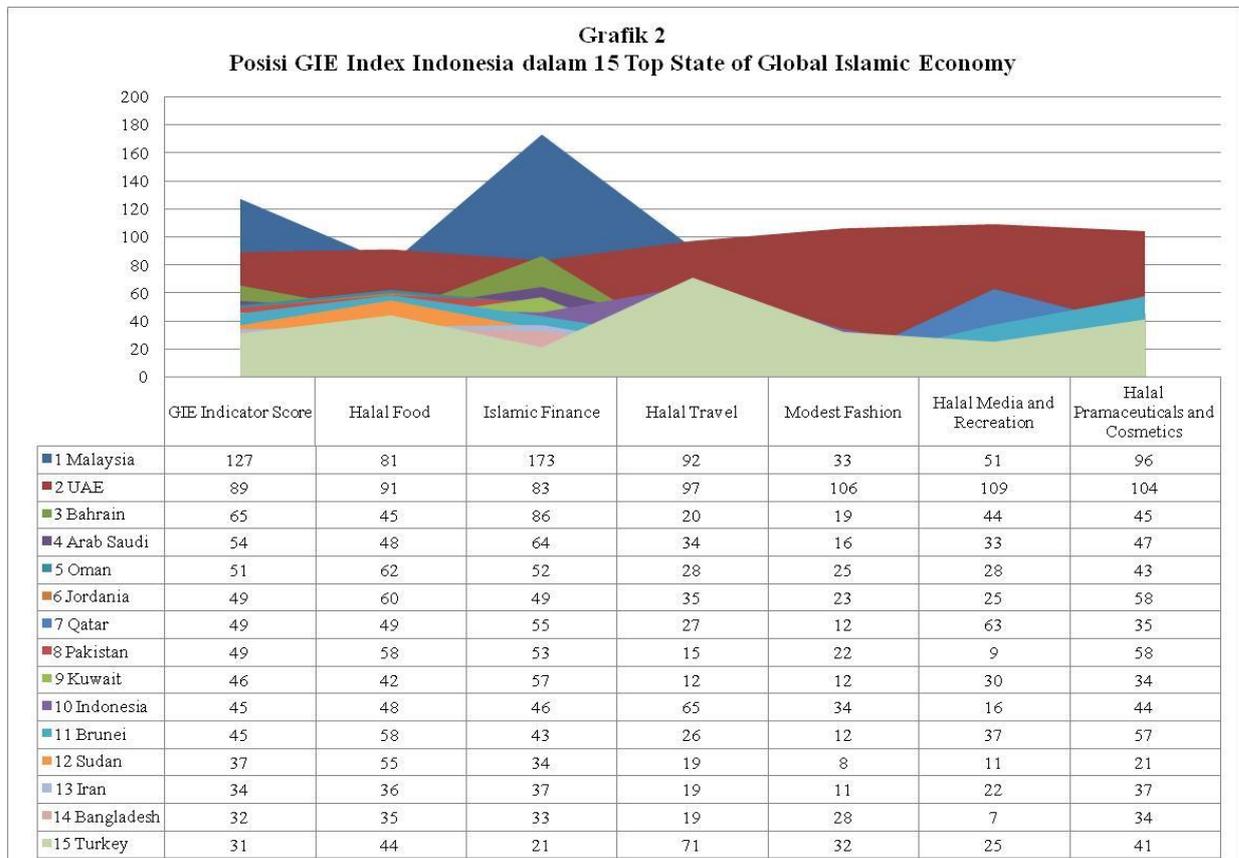
Sumber: visualcapitalist.com

Komponen *capabilities* merangsang dinamika penyelenggaraan pemerintahan untuk memilah kebijakan-kebijakan sebelumnya. Pemilahan ini akan diadaptasi dengan situasi perkembangan *external practices* dan *future uncertainties*. Tujuannya adalah setiap kebijakan baru yang dibuat menjadi relevan dan efektif untuk mencapai standar SDGs. Agar arah visi Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia perlu mengacu mapping SDGs (17 tujuan) dengan sektor-sektor global ekonomi Islam yang dibuat Thomson Reuters dalam *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*. Mapping tersebut sebagai berikut:

1. Produk Halal (*halal food, pharmaceuticals and cosmetics ingredients*) dengan prioritas 8 tujuan SDGs □ #2 Tanpa Kelaparan, #3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, #5 Kesetaraan Gender, #8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, #12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, #13 Penanganan Perubahan Iklim, #14 Ekosistem Laut, #15 Ekosistem Daratan.
2. Keuangan syariah (*Islamic Finance*) dengan 11 prioritas tujuan SDGs □ #1 Tanpa Kemiskinan, #2 Tanpa Kelaparan, #3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, #4 Pendidikan Berkualitas, #5 Kesetaraan Gender, #7 Energi Bersih dan Terjangkau, #8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, #9 Industri,

¹⁵ Artikel dalam internet — Jeff Desjardins, “Chart: The World’s Largest 10 Economies in 2030” dalam visualcapitalist.com/11-Januari-2019/ diakses 1-Nopember-2019.

- Inovasi dan Infrastruktur, #10 Berkurangnya Kesenjangan, #12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, #13 Penanganan Perubahan Iklim.
3. Lifestyle Halal (*travel, modest fashion, media/recreation*) dengan 7 prioritas tujuan SDGs □ # 5 Kesetaraan Gender, #8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, #9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, #10 Berkurangnya Kesenjangan, #11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, #12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, #13 Penanganan Perubahan Iklim.



Sumber: *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*

Grafik 2 menunjukkan bahwa dari 15 negara di atas hanya Turki yang masuk dalam proyeksi 10 besar negara berdasarkan GDP-nya pada tahun 2030. Masing-masing Malaysia dan UAE menempati peringkat 1 dan 2 terbaik dengan GIE Index sebesar 127 dan 89. Kekuatan Malaysia pada sektor Keuangan Syariah, sedangkan UEA unggul atas Malaysia dan negara lainnya pada semua sektor klaster produk halal (*halal food, pharmaceuticals and cosmetics ingredients*) dan lifestyle halal (*travel, modest fashion, media/recreation*). Sehingga bisa dikatakan bahwa Malaysia adalah pusat keuangan syariah sedangkan UEA pusat produk halal dan lifestyle halal terkemuka di dunia.

Seiring dengan proyeksi GDP Indonesia 2030 dan untuk Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia, ekonomi syariah harus lebih berkontributif dalam



perekonomian nasional. Berdasarkan grafik 2 diatas, sektor yang paling menonjol adalah *halal travel* dengan besarnya ideksnya adalah 65 (menempati ranking ke-4 dunia). Dan yang paling minim adalah *halal media and recreation*, dengan indeks sebesar 16 (menempati ranking 13 dunia). Semua sektor harus didorong agar GIE Index terus meningkat. Hal ini *in line* dengan dokumen Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah sektor riil, terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Secara lebih spesifik, yang dipilih adalah sektor produksi dan jasa. Terutama yang sudah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain.¹⁶

SIMPULAN

Perjalanan implementasi konsep *dynamic governance* dengan *adaptive policies* yang tertuang dalam Visi Indonesi Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia adalah bagian dari menjawab tantangan pengembangan ekonomi syariah, implementasi strategi di atas dituangkan dalam *quick wins* yang merupakan milestone pengembangan ekonomi syariah, dengan enam tahapan¹⁷. Pada tahapan pertama (2019), meletakkan landasan penguatan aspek hukum dan koordinasi; kedua (2020), kampanye nasional gaya hidup halal dibutuhkan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran mengonsumsi komoditas yang ramah Muslim; ketiga (2021), mendorong pembentukan dana halal nasional; keempat (2022), pendirian halal hub untuk penguatan industri halal dalam negeri; kelima (2023), pendirian dan aktivasi Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB) agar Indonesia menjadi pusat rujukan internasional dan sebagai standar *technical notes* yang diimplementasikan secara global; keenam (2024), penguatan kerjasama ekonomi internasional melalui *International Halal Center*.

Visi Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia semakin terbuka dan sangat prospektif seiring temuan Randeree (2019), menemukan empat tren (t) yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Islam: (t1) peningkatan nominal populasi Muslim global di atas rata-rata, dengan interaksi antaragama yang lebih besar dari beragam Budaya muslim; (t2) meningkatnya permintaan akan keragaman produk dan jasa yang sesuai dengan Syariah dan halal; (t3) meningkatkan status sosial ekonomi umat Islam di negara-negara maju dan berkembang; dan (t4) memperluas perspektif pemahaman agama dan meningkatnya minat terhadap melekat agama.¹⁸

¹⁶ Buku — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bapenas, Op.cit, 3

¹⁷ Buku — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bapenas, Op.cit, 422-423

¹⁸ Artikel dalam Jurnal — Kasim Randeree, “Demography, demand and devotion: driving the Islamic economy” dalam Journal of Islamic Marketing, 2019, 1



DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Fahri, *Praktik Inovasi Melalui Dynamic Governance*.
www.kompasiana.com/4-Pebruari-2019/ diakses 1-Nopember-2019
- Desjardins, Jeff, *Chart: The World's Largest 10 Economies in 2030*.
www.visualcapitalist.com/11-Januari-2019/ diakses 1-Nopember-2019
- Kasim, Azhar dkk, *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*. Jakarta: Kompas Media, 2018
- Neo, Boon Siong dan Chen, Geraldine, *DYNAMIC GOVERNANCE Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing, 2007
- Rachbini, D.J., *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Randeree, Kasim, "Demography, demand and devotion: driving the Islamic economy" dalam *Journal of Islamic Marketing*, 2019
- Thomas, Vinod dkk, *Kualitas Pertumbuhan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
-, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018
-, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*. Thomson Reuters, 2013
-, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*. Thomson Reuters, 2014-2015
-, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*. Thomson Reuters, 2015/16
-, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*. Thomson Reuters, 2016/17
-, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*. Thomson Reuters, 2018/2019
-, *Indeks Pembangunan Manusia 2018* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019)
-, *Arahan Terkait Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBS)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. (Arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs Semarang: 15 Desember 2017)
-, *What are the most urgent SDGs the Islamic economy must address?*
www.salaamgateway.com/29-October-2018/ diakses 1-Nopember-2019.
-, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018

